

Asuransi Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Nelayan

Fisherman Insurance to Increase The Social Welfare of Fishers

Indrya Sari¹✉, Andi Adri Arief², Andi Amri², Mardiana E.Fachry², Abdul Wahid²

¹Mahasiswa Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

²Dosen Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

✉corresponding author: indryasari19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, dalam mendukung proses terjadinya asuransi nelayan yang telah diberlakukan pemerintah pusat, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung nelayan dalam memperoleh kartu asuransi nelayan. Adapun dalam penentuan responden menggunakan teknik Snowball atau dikenal dengan istilah bola salju. Informan terpilih berdasarkan kriteria penerima kartu asuransi nelayan sebanyak 25 informan sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data melakukan observasi, pembagian kuisisioner dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada bulan Maret-Mei 2021. Dari hasil penelitian Proses sosialisasi yang direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibantu oleh aparat desa sangat efektif dalam mendorong antusiasme nelayan memperoleh keterangan dan menjadi anggota asuransi nelayan. Faktor pendukung implementasi asuransi nelayan terdiri dari; Komitmen tinggi dari DKP Kabupaten Takalar dalam merealisasikan asuransi nelayan, antusiasme Nelayan dalam mendapatkan informasi dan menjadi peserta asuransi nelayan dari pemerintah, serta dukungan yang tinggi dari pemerintahan desa dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan asuransi nelayan di Desa Sampulungan. Sementara faktor penghambat masih banyak nelayan yang belum memahami dengan baik pentingnya menjadi anggota asuransi nelayan; Adanya pengadministrasian pendataan yang belum falid, termasuk daftar ganda, serta masah berlaku kartu asuransi nelayan yang cuma satu tahun, dianggap singkat bagi nelayan.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Asuransi Nelayan, Kebijakan Pemerintah

Abstract

The purpose of this study was to determine the active role of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Takalar Regency, in supporting the process of the occurrence of Fisherman's Insurance that has been implemented by the central government, and to find out what factors hinder and support fishermen in obtaining Fisherman's Insurance cards. As for the determination of respondents using the Snowball technique or known as a snowball. Selected informants based on the criteria for receiving fisherman insurance cards as many as 25 informants as primary data sources. Data collection techniques are observation, distribution of questionnaires and interviews. This research was carried out in Sampulungan Village, Galesong District, Takalar Regency in March-May 2021. From the results of the research the socialization process planned and carried out by the Marine and Fisheries Service assisted by village officials was very effective in encouraging the enthusiasm of fishermen to obtain information and become insurance members fishermen, the supporting factors for implementing fisherman insurance consist of; High commitment from DKP Takalar Regency in realizing fishermen's insurance, enthusiasm of fishermen in obtaining information and being participants in fisherman insurance from the government, as well as high support from the village government in socializing and implementing fisherman insurance in Sampulungan Village. While the inhibiting factor is that there are still many fishermen who do not understand well the importance of being a member of fishermen's insurance; The existence of administrative data collection that has not been completed, including multiple lists, as well as the

issue of validity of the fisherman's insurance card, which is only valid for one year, is considered short for fishermen.

Keywords: Welfare, Fisherman Insurance, Government Policy

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayah perairannya cukup luas, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Meskipun Indonesia negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil dari penduduknya yang berdiam hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah yang ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) disebabkan rata-rata para nelayan hanya lulus sekolah dasar yang hanya bisa mengandalkan keahlian yang terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan berdampak kepada keluarga nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil usaha perikanan.

Potensi sumber daya manusia nelayan pada khususnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Ketersediaan sumber daya manusia juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi termasuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan, dambaan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, termasuk nelayan, kondisi kesejahteraan merupakan suatu kondisi keadaan yang didambakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian yang lebih luas dari kondisi sejahtera adalah suatu kondisi dimana masalah sosial dapat diminimalisir sehingga akibatnya tidak meluas. Adapun yang dimaksud masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan masyarakat, karena adanya gejala yang tidak diharapkan masyarakat atau gejala yang tidak terjadi sesuai norma, nilai dan standar sosial yang berlaku.

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan di bidang sumberdaya manusia misalnya lulusan masyarakat nelayan rata-rata SD, penguasaan teknologi misalnya penggunaan GPS hanya digunakan untuk penunjuk arah saja dan modal misalnya menggadaikan barang ke pegadaian. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Hal ini disebabkan porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks. Contoh, budaya masyarakat nelayan yang boros dan gengsi.

Upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada risiko, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan dan akan berdampak pada hilangnya pendapatan dari nelayan serta sumber pendapatan untuk menghidupi

keluarganya. Masalah-masalah tersebut sangat menghambat upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sehingga diperlukan program terintegrasi yang bisa menjawab problematika sosial, ekonomi dan lingkungan nelayan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (era 2015-2019) telah membahas nilai kompensasi asuransi jiwa bagi nelayan yang meninggal dunia saat penangkapan ikan. Nilai kompensasi asuransi bagi nelayan harus memperhitungkan tanggungan keluarga dan biaya sekolah untuk anak-anak yang ditinggalkan. Payung hukum tentang asuransi nelayan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam. Permen KP ini sebagai upaya dan tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai porosmaritim dunia dengan membangun perekonomian maritim yang dapat menyejahterakan masyarakat sekitar pesisir pantai khususnya nelayan.

Implementasi asuransi nelayan, kemudian dioperasionalkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dengan menerbitkan Kartu Nelayan yang kemudian melalui PERMEN KP No 70 tahun 2017 diterbitkan lagi kartu identitas tentang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu Nelayan ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran.

Program asuransi yang ada di Desa Sampulungan untuk kartu nelayan sudah ada sejak tahun 2018, dan untuk kartu kusuka pada tahun 2020. Program ini merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan mencapai Rp. 100 juta dan merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional. Faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dan memilih Desa Sampulungan, yakni berkaitan dengan kemiskinan yang membelenggu nelayan, pergolakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ditambah tingginya resiko kerja yang mereka hadapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2021 yang bertempat di Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini dipilih secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah kawasan pesisir dan mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dalam bidang perikanan (nelayan). Selain itu di Desa Sampulungan juga telah diimplementasikan asuransi nelayan yang memungkinkan untuk melakukan studi mengenai asuransi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif empirik. Dasar pemikiran metode ini adalah mencari kesimpulan secara induktif, dan menjadikan data sebagai sumber teori yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Penekanannya pada kondisi subjek, dengan mencari dan menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan

penggambaran secara holistik sehingga mencirikan makna kausalitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan perhitungan (Maleong, 2000; Bungin, 2003).

Menurut Sugiyono (2010) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Snowball atau dikenal dengan istilah bola salju. Informan terpilih berdasarkan kriteria penerima kartu asuransi nelayan. Selama penelitian berlangsung ditemukan sebanyak 25 informan sebagai sumber data primer.

Hasil dan Pembahasan

Payung Hukum Asuransi Nelayan

Landasan hukum yang digunakan untuk membahas penelitian ini tentang program asuransi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan di desa sampulungan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan pasal 1, pemerintah akan melakukan perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan serta kesulitan yang dihadapi untuk melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. Pemerintah juga akan melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam demi meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan usaha perikanan dan usaha pergaraman agar lebih baik dan lebih maju.

Pemerintah sudah menyusun strategi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penyusunan rencana strategis dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana strategis ini adalah agar aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar memiliki pandangan yang sama terhadap arah pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan maka dinas akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan agar nelayan paham dalam pengelolaan usaha nelayan, peningkatan produksi hingga membantu akses pemasaran, maka dari itu nelayan perlu dibina serta nelayan akan dibekali dengan inovasi teknologi penangkapan, agar nelayan bisa mencari ikan lebih jauh, karena semakin jauh nelayan itu menjelajah semakin banyak hasil tangkapan yang mereka dapatkan, secara tidak langsung pendapatan mereka akan bertambah.

Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga peraturan daerah. Program Asuransi Nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang di rancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya, sedangkan tujuannya adalah memberikan

jaminan perlindungan atas resiko yang dialami nelayan dan memberikan kesadaran nelayan untuk berasuransi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yaitu dengan memberikan bantuan melalui kartu nelayan. Asuransi ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bagian dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Di Desa Sampulungan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan berjumlah 534 orang, namun yang memiliki kartu nelayan hanya berjumlah 90 orang, di samping itu ada juga nelayan yang memiliki kusuka (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) yang berjumlah 43 orang. Sedikitnya jumlah yang memiliki kusuka ini disebabkan oleh para nelayan itu sendiri yang tidak melengkapi berkas, selain itu pemikiran nelayan yang tidak percaya dengan adanya bantuan dan akan percaya jika kedepannya ada beberapa nelayan yang mendapat bantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, maka nelayan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan adalah :

- a. Memiliki Kartu Nelayan yang masih berlaku
- b. Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT)
- c. Berusia maksimal 65 tahun
- d. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah daerah, atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah daerah namun Polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya
- e. Bagi Nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan tersebut tidak boleh diusulkan kembali dan diharapkan dapat mengikuti program asuransi secara mandiri
- f. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Mengisi formulir
- b. Melampirkan fotokopi kartu nelayan dan kartu keluarga
- c. Melampirkan fotokopi KTP

Adapun manfaat dari bantuan asuransi nelayan ini adalah:

- a. Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan yang menyebabkan kematian mendapatkan santunan berjumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- b. Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas di darat yang menyebabkan kematian mendapatkan santunan berjumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
- c. Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan yang menyebabkan cacat tetap mendapatkan santunan berjumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Santunan untuk biaya pengobatan mendapatkan berjumlah Rp. 15.000.000 juta

Bantuan Asuransi Nelayan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

Program asuransi yang ada di Desa Sampulungan untuk kartu nelayan sudah ada sejak tahun 2018, dan untuk kartu kusuka pada tahun 2020. Program merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan hingga mencapai Rp. 100 juta merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sampulungan.

“Asuransi nelayan ini sudah terealisasi dengan baik, bahkan sudah ada dari nelayan kita yang sudah merasakan bantuan tersebut untuk pengobatan, yang di akibatkan dari kecelakaan kerja saat melaut, adapun jumlah santunan yang dia dapatkan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta)”.

Wawancara berikut juga dipertegas oleh salah satu nelayan:

“Asuransi nelayan itu benar adanya bahkan saya sudah memiliki kartunya, dan sudah ada dari rekan saya yang menerima namun bagi saya pribadi tentunya tidak mau menerima santunnya seperti itu, tidak mungkin saya rela mengorbankan nyawa hanya demi mendapatkan santunan”

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah sudah merealisasikan program bantuan asuransi nelayan dengan dibuktikan dari bentuk pengeluaran kartu asuransi yang sudah diterima oleh nelayan.

Impelementasi Program Asuransi Nelayan di Desa Sampulungan

Dalam lingkup wilayah Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sudah menerapkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Dengan melihat kebijakan Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang di tetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia penulis menggunakan teori Edward III dalam Subarsono (2009) dalam melihat Asuransi Nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan Desa Sampulungan. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Kebijakan asuransi nelayan ini ada karena Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang sangat rawan terjadi kecelakaan dan banyak dari nelayan di Indonesia tidak mempunyai jaminan keselamatan jiwa didalam melakukan kegiatan dilaut, maka output dari kebijakan ini adalah nelayan mendapatkan jaminan jiwa dengan mengikuti program asuransi nelayan dari pemerintah dan mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan, sedangkan outcome dari kebijakan ini nelayan merasa pekerjaannya untuk mencari ikan dilaut cenderung lebih aman karena keselamatan jiwa nelayan sudah diasuransikan bagi nelayan yang telah mengikuti program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari pemerintah.

Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka informasi. Menurut Winarno, bahwa semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi. Hal ini sangat jelas bahwa untuk melakukan implementasi asuransi bagi nelayan agar asuransi yang sudah dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berjalan sesuai harapan maka perlu adanya komunikasi

yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Implementasi Program Asuransi Nelayan Daerah Pesisir juga tidak luput dari proses sosialisasi yang direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Nelayan dengan cara pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan langsung turun kelokasi untuk mengsosialisasikan program asuransi tersebut.

Faktor Sumberdaya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mendorong keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang baik. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan yang sudah direncanakan hanya akan menjadi rencana dan tidak dapat terealisasikan. Jika aktor yang mengimplementasikan kurang bertanggung jawab dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif maka yang terjadi program yang direncanakan bisa salah sasaran. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak berkompeten dibidangnya. Menurut Subarsono (2009) sumber daya diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dibidangnya (kompeten dan kapabel).

Keberhasilan Program Asuransi Nelayan di Desa Sampulungan sangat ditentukan oleh aktor pelaksana yang bekerja didalamnya. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi tiga sumber daya manusia yang mempunyai pengaruh penting untuk mengefektifkan Program Asuransi Nelayan yaitu:

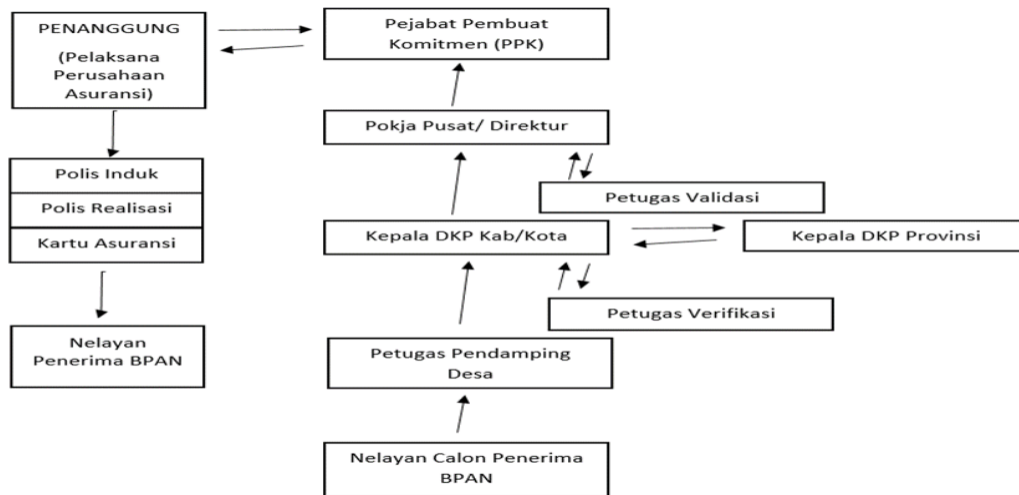
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar
- b. Pemerintah Desa Sampulungan
- c. Nelayan Desa Sampulungan

Faktor Sumber daya alam yang dimiliki Desa Sampulungan Kabupaten Takalar sangat banyak bisa dilihat dari hasil lautnya, tidak hanya hasil lautnya saja yang dimiliki Desa Sampulungan. Ada juga hasil dari komoditas pertanian yang dimiliki Desa Sampulungan.

Faktor Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menurut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya suatu kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kegiatan harus bisa mendukung suatu kebijakan yang sudah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Meskipun sudah terdapat sumber daya yang tersedia, pelaksana mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan menjadi tanggung jawab mereka dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun kurang efektif ketika struktur organisasi kebijakan tidak efisien. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat membuat kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan adanya Standard Operating Prosedure (SOP). Skema Bantuan Premi Asuransi Nelayan diperuntukkan bagi nelayan yang memenuhi prayaratan yang telah ditetapkan, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan BPAN maka perlu dibuat mekanisme pengusulan, penetapan nelayan penerima BPAN, pemberian Kartu Asuransi dan Polis, dengan cara:



Mekanisme Pengusulan, Penetapan Nelayan Penerima BPAN dan Pemberian Kartu Asuransi Serta Polis

- Petugas Pendamping Desa melakukan pendataan Nelayan Calon Penerima BPAN dan membuat laporan rekapitulasi data Nelayan Calon Penerima BPAN dan disampaikan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten/kota.
- Kepala DKP kabupaten/kota mengugaskan petugas verifikasi untuk melakukan verifikasi Nelayan Calon Penerima BPAN.
- Petugas Verifikasi membuat hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan disampaikan kepada kepala DKP kabupaten/kota menyampaikan dan merekap hasil dari daftar nama Nelayan Calon Penerima BPAN kepada pokja pusat/direktur dan tembusan kepala DKP Provinsi. Usulan rekapitulasi hasil verifikasi dapat dilakukan secara bertahap. Dalam rangka mempercepat penyampaian berkas usulan rekapitulasi hasil verifikasi ke pokja pusat melalui email yang di tentukan dan yang aslinya dikirim melalui pos.
- Pokja pusat/direktur memerintahkan petugas validasi untuk melakukan validasi terhadap rekapitulasi hasil verifikasi Nelayan Calon Penerima BPAN.
- Petugas validasi membuat hasil validasi yang dituangkan dalam berita acara validasi dengan melampirkan laporan rekapitulasi hasil validasi data nelayan yang diusulkan sebagai penerima BPAN untuk disampaikan ke pokja pusat/direktur dan dijadikan sebagai dasar usulan penetapan nelayan penerimaan BPAN.
- Selanjutnya pokja pusat/direktur mengusulkan nelayan penerima BPAN untuk ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).
- Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penanggung, selanjutnya pihak asuransi segera menerbitkan polis induk.
- Pihak asuransi juga segera menerbitkan polis realisasi dan kartu asuransi dengan jumlah yang sudah di validasi untuk diserahkan kepada Nelayan Penerima BPAN.

Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak PPK dengan pihak penanggung/asuransi berarti kedua belah pihak sudah menyepakati peraturan yang ada, selanjutnya pihak penanggung/asuransi menerbitkan polis induk yang secara rinci sudah diatur didalam kontrak. Daftar nama nelayan yang sudah mendaftar dan di validasi sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan akan mendapatkan BPAN, selanjutnya diserahkan kepada pihak penanggung untuk mendapatkan

perlindungan jika terjadi kecelakaan, meskipun polis realisasi dan kartu masih dalam proses penerbitan.

Faktor Disposisi/Sikap

Edward III Mengemukakan bahwa disposisi diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan, keinginan atau salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana dan berjalan dengan sesuai yang direncanakan di awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena adanya konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius di sebabkan faktor yang tidak berpemikiran yang sama.

Sikap para implementor untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus punya pemikiran yang luas dikarenakan suatu kebijakan dibuat memiliki tujuan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik lagi. Para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tetapi para implementor harus mempunyai kemauan untuk menerapkan kebijakan yang sudah direncanakan tersebut. Dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Asuransi Nelayan melalui pendamping desa untuk menyampaikan bagaimana tata cara dari program asuransi nelayan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Asuransi Nelayan

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai rencana. Banyak kebijakan yang telah dijalankan menghadapi masalah didalam proses implementasinya, karena implementasi program kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks. Untuk itu, dalam program asuransi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Sampulungan tentu adanya faktor pendukung dan penghambat didalam pelaksanaannya.

Faktor Pendukung Program Asuransi Nelayan

- a. Adanya komitmen tinggi yang ditunjukkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. Yang terus berupaya untuk terus memberikan sosialisasi terhadap para nelayan melalui program yang intensif agar nelayan paham mengenai program yang dirancang oleh pemerintah mengenai Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
- b. Antusiasme dari nelayan Desa sampulungan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping desa mengenai asuransi nelayan. Dikarenakan Dinas Kelautan dan perikanan memakai sistem jemput bola dengan “door to door” mendatangi rumah warga maupun perkumpulan nelayan untuk memberikan sosialisasi dan mendaftarkan para nelayan agar dapat memiliki kartu BPAN.
- c. Sikap yang tidak mudah menyerah bagi kepala desa sampulungan yang terus mendorong nelayan agar bisa segera mendapatkan asuransi.

Faktor Penghambat Program Asuransi Nelayan

- a. Faktor penghambat datang dari para nelayan yang belum paham secara menyeluruh terhadap pentingnya asuransi ini. Kenyataannya asuransi jiwa sangat penting bagi nelayan untuk menjamin ahli waris atau keluarganya jika mengalami kecelakaan dalam bekerja.

- b. Estimasi aktif kartu jaminan asuransi jiwa yang berlaku hanya satu tahun. Yang menurut nelayan waktu setahun itu hanya sebentar dan jika dilakukan setiap tahun untuk mendaftarkan nama mereka untuk mengikuti asuransi akan banyak membuang waktu untuk mengurusnya.
- c. Ada beberapa nama yang terdaftar dalam program Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang ditemukan nama ganda yang terdaftar sebagai peserta bantuan premi asuransi tersebut bahkan ada yang sudah tercetak.

Kondisi kesejahteraan

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Orang awam mengartikan "kesejahteraan sosial sebagai suatu situasi dan kondisi pribadi dan sosial yang menyenangkan". Ada pula yang menggambarkan dengan kalimat "segala sesuatu yang serba beres". Tidak ada hambatan, gangguan dan halangan, sehingga semuanya berjalan lancar. Ada pula ungkapan dalam bahasa Inggris "everything is running well". Semuanya itu adalah ungkapan-ungkapan tentang arti kesejahteraan sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu kondisi hidup dan kehidupan yang baik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif, dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan. Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta membuat seseorang yang kebetulan masih miskin menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan hidup ini merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup seseorang setapak demi setapak untuk penghidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih dalam posisi dibawah garis kemiskinan. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya aktifitas nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, maka dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sampulungan, diketahui bahwa para nelayan yang ada di desa tersebut termasuk dalam kategori keluarga sejahtera III (KS III) seperti:

1. Keluarga Dg Limbo, Nelayan yang berusia 40 tahun yang tinggal di Desa Sampulungan yang mampu membuat rumah batu dari pendapatan yang dia peroleh dari hasil penangkapan ikan. Sedangkan pola makannya yaitu 3 kali sampai 4 kali dalam sehari serta berperan aktif dalam gabungan kelompok nelayan yang ada di Desa sampulungan.
2. Bachtiar Dg. Tangnga, Nelayan yang berusia yang berusia 40 tahun yang tinggal di Desa Sampulungan yang mampu membuat rumah batu dari pendapatan yang dia peroleh dari hasil usaha penangkapan ikan yang ia miliki. Sedangkan pola makannya yaitu 4 kali dalam sehari serta berperan aktif dalam gabungan kelompok nelayan yang ada di Desa Sampulungan.
3. Dg. Bui, Nelayan yang berusia yang berusia 54 tahun yang di Desa Sampulungan yang mampu membuat rumah batu dari pendapatan yang dia peroleh dari hasil usaha Penangkapan Ikan yang ia miliki. Sedangkan pola makannya yaitu 3 kali sampai 4 kali dalam sehari serta berperan aktif dalam gabungan kelompok nelayan yang ada di Desa Sampulungan.

Dari ketiga masyarakat nelayan, diketahui bahwa ketiga keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga sejahtera III (KS III) karena mampu menjangkau pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan

Salah satu aspek dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui usaha nelayan di Desa Sampulungan adalah pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat di Desa Sampulungan yang memiliki usaha jual beli ikan. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan salah satu impian para masyarakat nelayan. Sebagaimana ungkapan salah satu informan:

“Dengan pendidikan yang murah dan mudah, kami dapat menyekolahkan anak kami mulai dari SD sampai SMA. Selain itu, pekerjaan nelayan yang kami lakukan membuat kami mampu menyekolahkan anak-anak kami hingga kuliah di Makassar”.

Informasi di atas menunjukkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot seperti yang dilakukan masyarakat bekerja sebagai nelayan di Desa Sampulungan, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta masyarakat di Desa Sampulungan.

Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang menjadi prioritas utama yang harus dimiliki oleh masyarakat di Desa Sampulungan. Karena ketika masyarakat di Desa Sampulungan sakit atau tidak sehat, maka mereka tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, namun kenyataan yang penulis temui dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat cukup baik, selain mereka menabung untuk pendidikan anak, mereka juga menyalurkan pendapatan mereka untuk keperluan kesehatan yang mendesak. Meskipun di Desa Sampulungan tersedia fasilitas pelayanan kesehatan gratis, namun nelayan tetap menyalurkan uang untuk kesehatan. Hal ini mereka lakukan untuk menantisipasi apabila ada anggota keluarga yang sakit secara tiba-tiba dan harus dirujuk ke rumah sakit daerah atau provinsi. Karena masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu karena di Desa Sampulungan telah ada Poskesdes dan Posyandu.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori keluarga sejahtera III (KS III) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.

- b. Keluarga mempunyai tabungan.
- c. Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
- d. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
- e. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
- f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi, majalah.
- g. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III (KS III) dengan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar maka diperlukan adanya asuransi. Dengan perlindungan asuransi tersebut, nelayan akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memusatkan perhatian pada penangkapan ikan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan.

Dasar pemikiran diperlukannya asuransi bagi nelayan adalah karena asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank memiliki fungsi sebagai sarana pengalihan risiko kerugian yang terjadi pada nelayan. Dengan asuransi, diharapkan nelayan terhindar dari risiko kerugian akibat cuaca buruk di laut, kecelakaan kapal, kondisi lingkungan laut yang tercemar, yang semua risiko itu dapat berakibat pada kecelakaan bagi nelayan, kondisi cacat raga, dan pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya atau hilangnya penghasilan yang digunakan untuk menghidupi keluarga. Namun masih terdapat nelayan yang belum mengetahui dan memahami seperti apa program Bantuan Asuransi Nelayan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sehingga nelayan tidak mau mendaftar program bantuan premi asuransi nelayan tersebut.

Simpulan

Proses sosialisasi direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibantu oleh aparat desa sangat efektif dalam mendorong antusiasme nelayan memperoleh keterangan dan menjadi anggota asuransi nelayan. Faktor pendukung implementasi asuransi nelayan terdiri dari; Komitmen tinggi dari DKP Kabupaten Takalar dalam merealisasikan asuransi nelayan, antusiasme Nelayan dalam mendapatkan informasi dan menjadi peserta asuransi nelayan dari pemerintah, serta dukungan yang tinggi dari pemerintahan desa dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan asuransi nelayan di Desa Sampulungan. Sementara faktor penghambat masih banyak nelayan yang belum memahami dengan baik pentingnya menjadi anggota asuransi nelayan; Adanya pengadministrasian pendataan yang belum falid, termasuk daftar ganda, serta masah berlaku kartu asuransi nelayan yang cuma satu tahun, dianggap singkat bagi nelayan

Daftar Pustaka

- Fargomeli, F. 2014. *Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*. Journal Acta Diurna vol 3, no.3: 1-17.
- Haris W dan Kusuma, 2016. Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas jember. e-sospol volume 3 edisi1.
- Husna, Nurul. 2014. *Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Jurnal Al-Bayan. Vol. 20, No. 29.

- Imron, Ali. 2012. Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Riptek Vol. 6, No.1, Tahun 2012, Hal. 27 – 37.
- Nazula, Alfinatun. 2018. Strategi Program Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Rembang. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Rahim, Abdul. 2011. Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. Jurnal Sosek KP Vol. 6 No. 2
- Ramadhan, A., Yuliati, C & Koeshendrajana, S. 2017. *Indeks Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Indonesia*. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan vol 12, no.2: 235-253.
- Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jurnal geografi. e-ISSN: 2549–7057. Vol 9 No. 1
- Safri Miradj, Sumarno. 2014. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN, MELALUI PROSES PENDIDIKAN NONFORMAL, UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 – Nomor 1, Maret 2014
- Silooy Marissa. 2017. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan absolut masyarakat pesisir (nelayan) di desa seilale kecamatan nusaniwe. Jurnal ekonomi. Vol XI. No 1.
- Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suradi, 2007. *Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2007 : 1-11
- Suryaningsi, T. 2017. *Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan*. Handep vol 1, no.1: 49-62.
- Suwandi. 2018. *Strategi Bertahan Hidup Nelayan dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga*. Skripsi. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Tanjungpinang.
- Syakir, Ahmad. 2017. *Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional Di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa tengah*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yuliana. 2020. *Coronavirus Disease (COVID-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness and Healthy Magazine vol 2, no.1: 187-192, viewed 18 Mey 2020, <https://wellness.journalpress.id/wellness>.